

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Triwulan II Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman selama periode Triwulan II yang telah berjalan, sesuai dengan amanat Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen ini memuat informasi mengenai target kinerja, capaian target, permasalahan dan potensi capaian triwulan, serta rencana tindak lanjut pada pelaksanaan program di bidang kawasan permukiman. Kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi sekaligus sebagai masukan konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola program serta pelayanan kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya jajaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Triwulan II Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada triwulan berikutnya.

Jakarta, 15 Juli 2026

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman



Ir. Fitrah Nur, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas dan Fungsi.....	3
I.3 Struktur Organisasi	4
BAB II CAPAIAN KINERJA	7
II.1 Target Kinerja Triwulan II	7
II.2 Capaian Target Triwulan I.....	19
II.3 Permasalahan.....	49
BAB III PENUTUP	62
III.1.Rencana Tindak Lanjut.....	62
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Rincian Target Pencapaian Indikator Program Ditjen KP TA 2026	7
Tabel II. 2 Target Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Triwulan II.....	8
Tabel II. 3 Kategorisasi Capaian Kinerja	19
Tabel II. 4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Ditjen Kawasan Permukiman Triwulan II.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 4

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian dari hak dasar setiap Warga Negara Indonesia. Setiap individu memiliki hak untuk menempati hunian yang layak sebagai bagian dari kehidupan yang sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan.

Komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas hunian yang layak juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak menempati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan tertata. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman guna memastikan pemenuhan hak tersebut, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian layak.

Meskipun telah tersedia kerangka regulasi serta berbagai program pendukung, tantangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman layak masih cukup besar. Tingginya angka backlog perumahan, berkembangnya kawasan kumuh, serta ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, dan drainase menjadi permasalahan yang masih dihadapi di berbagai daerah. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, terdapat sekitar 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah (backlog kepemilikan) dan 26,9 juta rumah tangga yang masih menempati rumah tidak layak huni (backlog kelayakan). Kondisi ini semakin diperparah oleh laju urbanisasi yang tidak terkendali, keterbatasan ketersediaan lahan, serta perbedaan kapasitas antarwilayah dalam penyediaan layanan permukiman.

Sebagai upaya menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah menetapkan program prioritas pembangunan yang berfokus pada percepatan capaian nyata di sektor strategis, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Pembangunan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak, terjangkau, serta dilengkapi dengan akses sanitasi yang memadai, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kebijakan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menargetkan peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak dan berkelanjutan, dari 67% pada tahun 2025 menjadi 74% pada tahun 2029. Selain itu, pembangunan permukiman juga difokuskan pada percepatan penyediaan hunian bagi MBR, penanganan kawasan kumuh, serta peningkatan layanan infrastruktur dasar melalui pendekatan yang adaptif dan kolaboratif.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman. Fokus utamanya adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, termasuk fasilitasi penyiapan lahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan.

Kebijakan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman diarahkan pada peningkatan jumlah hunian layak sekaligus percepatan penanganan kawasan kumuh melalui penguatan ekosistem perumahan dan permukiman yang terpadu, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sasaran program dibagi dalam dua pilar utama, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, capaian program diukur melalui tiga indikator utama, yakni: persentase peningkatan hunian layak di kawasan permukiman; (2) persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh; serta (3) persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan tidak hanya intervensi pemerintah, tetapi juga kolaborasi yang kuat dengan masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan permukiman yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan.

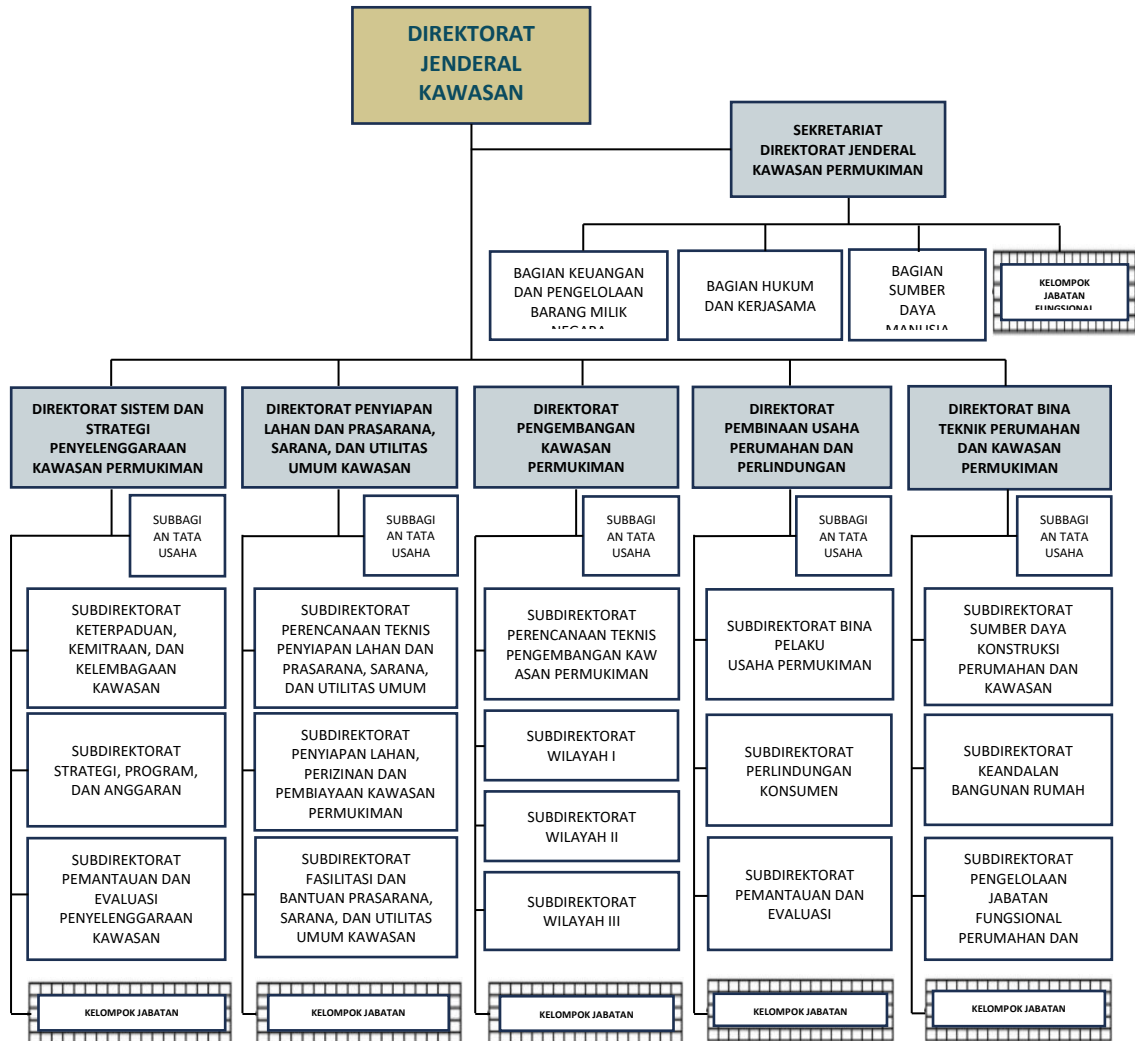
I.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman maka tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
3. Bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut.



Gambar I. 1 Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terdiri dari 6 Unit Kerja Eselon II dengan didukung oleh 19 Bagian/Subdirektorat, 5 Subbagian Tata Usaha beserta kelompok Jabatan Fungsional, serta 19 BP3KP dan 36 Satuan Kerja PKP. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebanyak 2.056 orang dengan penempatan di Kantor Pusat maupun di UPT BP3KP/ Satker PKP.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman

Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi penyiapan lahan, perizinan, pembiayaan, fasilitasi kerja sama, koordinasi dan pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta evaluasi dan pelaporan.

Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman

Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan sarana laboratorium dan peralatan pengujian, pembinaan sumber daya konstruksi perumahan dan kawasan permukiman, pembinaan teknik keandalan bangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta penyelenggaraan sistem informasi dan pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan profesi bidang perumahan.

BAB II CAPAIAN KINERJA

II.1 Target Kinerja Triwulan II

Target pencapaian kinerja program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman adalah berdasarkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal Direktur Jenderal Kawasan Permukiman TA 2026. PK TA 2026 Ditjen Kawasan Permukiman merupakan perjanjian antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku pemberi tugas dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman selaku pelaksana tugas yang memuat sasaran-sasaran strategis berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

PK Ditjen Kawasan Permukiman TA 2026 memuat program kegiatan Ditjen Kawasan Permukiman TA 2026 yang terdiri dari Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dukungan Manajemen Infrastruktur Permukiman. Program kegiatan tersebut perlu dilaporkan setiap triwulan, dengan mencantumkan target dan realisasi capaian kinerja.

Target kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada program Ditjen Kawasan Permukiman TA 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 1 Rincian Target Pencapaian Indikator Program Ditjen KP TA 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman	1	Persentase ketersediaan rumah layak huni	100%
		2	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni	100%
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh	100%
3	Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak	1	Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak	100%
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya	1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	86,26%

Target indikator kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2026 mengacu pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Revisi 1 yang terbit pada tanggal 29 Desember 2025. PK Dirjen Kawasan Permukiman Tahun 2026 menyebutkan bahwa Ditjen Kawasan Permukiman memiliki 4 (empat) Sasaran Program, di antaranya Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman, Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh, Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, serta Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya.

Adapun rincian target triwulanan Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel II. 2 Target Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Triwulan II

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	Satuan	Target Tahun 2026	TW II	Pagu (Rp)
					TARGET FISIK	
	Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	SP-1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman				
	IKSP-1	Persentase ketersediaan rumah layak huni	%	100	29,72	
	IKSP-2	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	34,49	
	K-1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Kawasan Permukiman				
	SK-1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni				
		IKK.1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	%	100	1,75	

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW II	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			7659.ABF.001 Kebijakan dan Strategi Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RO 2025)	Rekomendasi Kebijakan	2	0	1.631.996.000
			7659.PBF.001 Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	20	1	2.440.576.000
			7659.BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	20	1	1.189.734.000
			7659.FAE.001 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	2	0	643.095.000
		IKK.2 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah pesisir		%	100	4,50	
			7659.BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	20	1	1.189.734.000
		IKK.3 Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir		%	100	34,49	
			7659.ABF.001 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				
			realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman (Unit BPS)	Unit	120.000*	45.987	
			7659.ABF.001 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				
			Capaian Renstra Ditjen Kawasan Permukiman 2025-2029 dan Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat	Desa	54	0.00	

No	Kode	Program/Kegiatan/Output			Satuan	Target Tahun 2026	TW II	Pagu (Rp)
							TARGET FISIK	
				bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman hingga memenuhi desa 100% RLH				
	K-2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman						
	SK-2	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman						
		IKK.1 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU			%	100	0.00	
				7659.ABF.003 Kebijakan Fasilitasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1.123.066.000
				7659.CBR.001 Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	Dokumen	2	0	2.470.553.000
				7659.FAE.002 Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	2	0	1.422.777.000
				7659.AFA.002 Penyusunan NSPK Bidang Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	NSPK	0	0	0
				7659.PEA.001 Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman	Kegiatan	1	0	299.203.000
		IKK.2 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum*			%	100	0.00	
				7659.RBB.001 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	807	0	10.524.600.000
		IKK.3 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal			%	-	-	
				7659.RBB.004 PSU Hunian Vertikal di Kawasan Permukiman	Unit	-	-	0

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW II	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
		IKK.4 Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau		%	100	21,69	
			7659.PEA.001 Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman	Kegiatan	1	0	299.203.000
			(BA BUN) Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan 457.025 Unit selama 5 tahun	Unit	95.800	41.559	
	K-3	Penyediaan Rumah Layak Huni					
	SK-3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
		IKK.1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas		%	100	26,66	
			7659.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	120.000	45.987	2.670.000.000.000
			7659.RBB.007 Rumah Bersanitasi Layak di Kawasan Permukiman	Unit	1.000	150	10.800.000.000
		IKK.2 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru		%	100	0.00	
			7659.RBB.005 Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	0	0	0
		IKK.3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman		%	100	5	4.156.500.000
			7659.ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rekomendasi kebijakan	1	0	765.411.000
			7659.AFA.003 Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	NSPK	1	0	265.251.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW II	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			7659.BMA.003 Data dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	0	161.064.000
			7659.CBR.002 Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	3	1	2.280.553.000
			7659.FAE.003 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan	4	2	2.616.142.000
	K-4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
	SK-4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
		IKK.1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru (Rumah Khusus)		%	100	0.00	
			7659.RBB.003 Rumah Khusus Kawasan Pesisir	Unit	244	0	80.625.340.000
		IKK.2 Persentase Peningkatan penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (Rumah Susun)		%	100	0.00	
			7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun	Unit	85	0	36.000.000.000
	SP-2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
	IKSP	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh		%	100	10.00	
	K-1	Penanganan Permukiman Kumuh					
	SK-1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
		IKK.1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		%	100	0.00	
			7659.RBB.006 Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	75,00	45	46.755.740.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW II	Pagu (Rp)	
						TARGET FISIK		
	SP-3	Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak						
	IKSP	Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak		%	100	36,67		
	IKSP-1	Persentase pelaku usaha perumahan anggota asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina		%	80	50		
	IKSP-2	Persentase Layanan Fasilitas Pengaduan Konsumen Perumahan		%	100	50		
	IKSP-3	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		%	100	10.00		
	K-1	Dukungan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						
	SK-1	Meningkatnya pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan						
		IKK.1 Persentase asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina		%	100	50.00		
				7659.BDB.001 Pembinaan Lembaga Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Fasilitas Bimbingan Teknis Konsumen Perumahan	Lembaga	4	4	1.082.593.000
				7659.ABF.006 Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	431.963.000
		IKK.2 Tingkat pencapaian pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan layanan bantuan teknis dalam rangka perlindungan konsumen perumahan		%	100	85		
				7659.AEA.001 Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Konsumen Perumahan	Kegiatan	1	1	744.211.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW II	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			7659.ABF.005 Kebijakan, Strategi dan Program Bidang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	Rekomendasi Kebijakan	1	0	134.407.000
			7659.ABF.006 Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	431.963.000
			7659.AEA.002 Koordinasi Antar Instansi/Lembaga Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Perumahan	Kegiatan	1	1	236.670.000
			7659.FAE.004 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Perumahan dan Konsumen serta Pelaporan Kinerja	Laporan	2	0	235.746.000
	SK-2	Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
		IKK.1 Persentase rekomendasi kebijakan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman		%	100	0.00	
			7659.ABF.007 Kebijakan Teknis Pengembangan Teknologi Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	0	248.137.000
		IKK.2 Persentase regulasi (NSPK) bidang perumahan dan kawasan permukiman		%	100	0.00	
			7659.AFA.002 Penyusunan NSPK Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman	NSPK	1	0	356.512.000
		IKK.3 Persentase dukungan pengembangan teknologi dan pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman		%	100	25.00	
			7659.CBR.003 Dokumen Dukungan Teknis Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Infrastruktur	Dokumen	4	1	1.098.704.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output			Satuan	Target Tahun 2026	TW II	Pagu (Rp)
							TARGET FISIK	
				Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
				jumlah dokumen dukunga teknis pengembangan teknologi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	1	1	
				jumlah dokumen dukungan teknis pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	3	0	
		IKK.4 Persentase peningkatan kapasitas ASN pejabat fungsional bidang perumahan dan kawasan permukiman			%	100	25.00	
				7659.DCB.001 Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman	Orang	200	50	484.616.000
				Jumlah ASN (JF PKP dan non JF PKP) yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman	Orang	150	50	
				Jumlah Penyelenggara Konstruksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman	Orang	50	0	
		IKK.5 Persentase hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja			%	100	0.00	
				7659.FAE.005 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Teknologi dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	0	201.337.000
	Program	Dukungan Manajemen						
	SP-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
	IKSP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman			%	86.26	21.57	
	IKSP-1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan			%	74.1	37.05	117.320.000
				7674.EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1		

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW II	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
	IKSP-2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		%	72.38	36.19	8.738.822.000
			7674.EBA.Z06 Layanan BMN	Layanan	20		
			7674.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1		
			7674.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	106		
	IKSP-3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		%	82.1	41.05	630.560.000
			7674.EBA.Z01 Layanan Hukum	Layanan	1		
	IKSP-4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana		%	75	37.5	932.415.000
			7674.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1		
			7674.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1		
			7674.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	Layanan	37		
	IKSP-5	Nilai Kinerja Anggaran		%	88.5	44.25	4.495.647.000
			7674.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	61		
			7674.EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1		
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1		
	IKSP-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100	50.00	424.283.000
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1		
	IKSP-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		%	92.3	23.08	100.000.000
			7674.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1		
	IKSP-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	86.25	43.13	444.320.000
			7674.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	19		
	IKSP-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		%	100	50.00	180.091.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW II	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			7674.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1		
	IKSP-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP		%	92	46.00	197.400.000
			7674.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1		
	K-1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					
	SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		%	87.8		
		IKK.1 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	72.38	18.10	
			7674.EBA.Z06 Layanan BMN	Layanan	20		
			7674.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1		
			7674.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	106		
		IKK.2 Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100.00	50.00	
			7674.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1	1	
			7674.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	
			7674.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	Layanan	37		
		IKK.3 Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	7674.EBA.962 Layanan Umum	%	88.50	44.25	
			7674.EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	61		
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1		
		IKK.4 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100.00	50.00	
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1		
		IKK.5 Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.30	46.15	
			7674.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1		
		IKK.6 Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	86.25	43.13	

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW II	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			7674.EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1		
		IKK.7 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	74.10	37.05	
			7674.EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1		
		IKK.8 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		%	82.10	41.05	
			7674.EBA.Z01 Layanan Hukum	Layanan	1		
		IKK.9 Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		%	92.00	46.00	
			7674.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1		

II.2 Capaian Target Triwulanan II

Target kinerja yang telah tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman tahun 2026, secara keseluruhan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan mengacu kepada kegiatan dan indikator kinerja yang sudah tercantum di dalam PK tersebut. Target pencapaian kinerja program dilakukan secara bertahap setiap triwulan, dengan mencantumkan target dan realisasi capaian kinerja. Sehingga dapat diketahui kegiatan mana yang sesuai atau tidak sesuai dengan target kinerja. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka hal tersebut dapat diidentifikasi melalui kendala dan permasalahan. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut atas kendala dan permasalahan yang dihadapi. Sehingga ke depan dapat dilakukan perbaikan atau peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Capaian kinerja kegiatan triwulan ke II merupakan realisasi dari pelaksanaan target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya pada dokumen Rencana Aksi dengan mengacu pada dokumen PK yang berlaku. Triwulan ke II adalah pelaksanaan kegiatan pada bulan April sampai dengan Juni 2026. Untuk melakukan identifikasi terhadap capaian kinerja, maka dilakukan pengelompokan atau penyusunan kategori capaian kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kategorisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel II. 3 Kategorisasi Capaian Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan pada unit kerja
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan tidak mendasar, akuntabilitas unit kerja
6	C	>30 – 50	Kurang, perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar di level pusat
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, perlu perbaikan yang sangat mendasar2 khususnya dalam implementasi SAKIP

Capaian kinerja triwulan ke II Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terdiri dari beberapa kegiatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
 - a. Telah dilaksanakan agenda *Focus Group Discussion (FGD)* Ke-2 yang membahas buku data, analisis dan peta dokumen RP3KP
 - b. Telah dilaksanakan rapat pembahasan secara internal terkait dengan amanat penyusunan RP3KP dalam UU 1/2011 dan RUU OBL Perumahan
 - c. Dilaksanakan kegiatan audiensi dan pendampingan terhadap beberapa pemerintah daerah terkait dengan penyusunan RP3KP seperti Kota Bandung, Kab. Pesisir Selatan, dan Kab. Bangka
2. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman
 - a. Layanan Klinik PKP yang terlaksana di seluruh Balai P3KP sebanyak 20.296 layanan
 - b. Telah dilaksanakan rapat pembinaan layanan klinik perumahan dan kawasan permukiman TA 2026 di Bandung
 - c. Telah dilaksanakan rapat peningkatan layanan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Wilayah Balai P3KP Sumatera II
3. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
 - a. Realisasi untuk pendataan 3 Juta Rumah PKP delineasi pesisir per Bulan Juni 2026, adalah sejumlah 11.183 unit untuk PK, dan 31.074 unit untuk PB.
 - b. Dilaksanakan agenda *Workshop* Penginputan Data Capaian RO dan Komponen Triwulan pada Aplikasi e-Monev Bappenas TA 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas unit kerja dalam pelaksanaan pemantauan data pada aplikasi e-Monev Bappenas
 - c. Telah dilaksanakan Forum Koordinasi Teknis Data Program Perumahan Nasional Lintas Kementerian/Lembaga Tahun 2026. Rapat bertujuan untuk memastikan keselarasan dan integrasi dan program perumahan lintas K/L untuk mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah
 - d. Dilaksanakan Rapat Pembahasan Distribusi Target Program 3 Juta Rumah Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

4. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
 - b. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi dan Validasi Data Penyediaan Perumahan Rakyat yang Layak Huni dan Terjangkau TA 2025 dan TA 2026 untuk memfasilitasi diskusi pemenuhan bukti dukung permintaan data oleh BPKP
 - c. Melakukan persiapan Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Pusat dan Daerah Nasional Tahun 2026 dalam rangka membahas rencana pelaksanaan Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Pusat dan Daerah Nasional Tahun 2026 berkoordinasi dengan Ditjen Perumahan Perkotaan, Ditjen Perumahan Perdesaan, serta Biro Perencanaan dan Kerja Sama
5. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Fasilitasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman
 - a. Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* Integrasi Penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta Tata kelola Penyelenggaraan PSU
 - b. Dilakukan kegiatan visitasi dan verifikasi lokasi lahan milik BUMN dan Badan Bank Tanah yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Kota Satelit di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur
6. Pelaksanaan kegiatan Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU
 - a. Pelaksanaan pelatihan penggunaan alat survei lapangan
 - b. Pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan sesuai dengan proses bisnis dan baku mutu waktu pada SOP penyiapan lahan
 - c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum TA 2026
 - d. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Proses Perizinan dan Kesiapan Lahan Pembangunan Rusun TNI AL Kab. Pasuruan

- e. Dilakukan verifikasi teknis untuk alternatif pengganti lokasi Komdigi yaitu di Tapos, Sukatani
 - f. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap untuk Masyarakat Korban Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
 - g. Pelaksanaan Rapat Pemenuhan RC Huntap Relokasi Terpusat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta Tata Cara Pengisian Kelengkapan Dokumen pada SIBARU
7. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman
- a. Permohonan Reviu Itjen dan Ditjen TKPR untuk Proyek MYC Rumah Susun dan Huntap Lewotobi
 - b. *Market Sounding* Etalase Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 untuk produk etalase Rusun tipe Arthaloka 4 lantai dan tipe Arunika 4 lantai
 - c. Dilakukan proses verifikasi administrasi dan peninjauan Lokasi Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
 - d. Dilakukan penyusunan draf saran masukan terhadap revisi SE 03 TKPR tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rumah Susun serta menghadiri rapat penyempurnaan revisi 03 TKPR
 - e. Penyusunan Laporan Progres Mingguan Direktorat Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman
8. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman
- a. Realisasi Penyaluran FLPP sebanyak 25.052 unit
 - b. Adanya pelatihan/peningkatan literasi dan kompetensi terkait kegiatan pembiayaan
 - c. Koordinasi antar unit kerja pengampu kegiatan pembiayaan dan Dit. Penyusunan Sistem Pembiayaan PKP selaku PIC kegiatan
 - d. Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan berkala dengan BP Tapera dan melalui Dashboard Ekosistem Pembiayaan Perumahan BP Tapera
9. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pembangunan PSU
- a. Dilaksanakan penyusunan DED oleh Satker/PPK

- b. Telah diterbitkan SK Dirjen Kawasan Permukiman No. 70/KPTS/Dp/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan PSU Perumahan Tapak di Lingkungan Ditjen Kawasan Permukiman TA 2026 tanggal 09 Juni 2026
 - c. Telah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan PSU Perumahan Tapak TA 2026 No. RU.08.02/Dp.03/143/B/2026 tanggal 10 Juni 2026
 - d. Sedang dilaksanakan pembahasan Reviu DED untuk seluruh provinsi pada 23 Juni 2026 hingga 07 Juli 2026
 - e. Telah diterbitkan Surat Perintah Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Tapak TA. 2026 Balai Sumatera III No. RU1101-Bp/1177 tanggal 25 Juni 2026
 - f. Telah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PSU Rumah Tapak Balai Kalimantan II No. RU.08.1/Bp13/2571/B/2026 tanggal 30 Juni 2026
 - g. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum TA 2026
10. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pembangunan Rumah Susun
- a. Revisi Anggaran Rumah Susun
 - b. Permohonan Reviu Itjen dan Ditjen TKPR untuk MYC Rumah Susun dan Huntap Lewotobi
 - c. Market Sounding Etalase Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026
 - d. Verifikasi Administrasi Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
 - e. Pengajuan Permohonan Dispensasi Kontrak Rumah Susun
11. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Pembangunan Rumah Khusus Kawasan Pesisir
- a. Pendampingan Pelaksanaan Verifikasi Lokasi Huntap bagi Masyarakat terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
 - b. Pelaksanaan Rapat Pemenuhan RC Huntap Relokasi Terpusat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta Tata Cara Pengisian Kelengkapan Dokumen pada SIBARU

12. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman
 - a. Telah dilaksanakan invertebrata secara bertahap (113.721 unit)
 - b. Telah dilaksanakan penetapan CPB secara bertahap (37.680 unit)
 - c. Telah dilaksanakan penetapan CPB pengganti secara bertahap (20.672 unit)
13. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sanitasi layak di kawasan permukiman
14. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Penyelenggaraan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Penyiapan program dan anggaran penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman
 - b. Penyiapan revisi anggaran berkaitan dengan kegiatan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman
 - c. Rapat Koordinasi dan Percepatan Kegiatan Fisik
15. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Sanitasi
 - b. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh (Rapermen)
 - c. Penyusunan SOP di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
 - d. Penyusunan PKS dengan Mitra CSR terkait Dukungan Penanganan Kawasan Kumuh/BSPS
16. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Data dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman
17. Pelaksanaan kegiatan Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Pelaksanaan pendampingan Verifikasi Teknis Kegiatan Fisik
 - b. Pelaksanaan kegiatan audiensi dengan Pemerintah Daerah
18. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh
 - a. Pelaksanaan Rapat progres kegiatan BSPS, Kumuh, dan Sanitasi
 - b. Penyusunan Laporan Triwulanan

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Subdirektorat Wilayah
19. Pelaksanaan kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh
- a. Sudah tayang lelang supervisi kegiatan kumuh di provinsi Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan;
 - b. Sudah tayang lelang fisik kegiatan kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Sudah terbit SK Lokasi Kumuh Tahap I-IV untuk 6 provinsi yang termasuk dalam wilayah kerja DJKP, yaitu Provinsi Jambi, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.
20. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Fasilitas Bimbingan Teknis Konsumen Perumahan
- a. Pelaksanaan pembinaan kepada Pemerintah Daerah, Asosiasi, Lembaga dan Pelaku Usaha untuk Permen PKP 04/2025 dan Permen PKP 18/2025 melalui kegiatan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kapasitas para pihak
 - b. Penyusunan Juknis Interoperabilitas oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dengan Ditjen KP, dalam rangka akses pangkalan data AHU.
21. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Konsumen Perumahan
- a. Pelaksanaan sosialisasi SE di beberapa Balai dan tindak lanjut pengaduan konsumen dengan mengunjungi lokasi pengaduan
22. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan, Strategi dan Program Bidang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen
- a. Berpartisipasi dalam Pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) antara Kementerian PKP, Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan, yang membahas rencana kegiatan di TA 2027, Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen mengusulkan tambahan anggaran untuk menunjang tugas dan fungsi
23. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan
- a. Penyusunan Peraturan Menteri PKP tentang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen

- b. Penyusunan Peraturan Menteri PKP tentang Pengelolaan Rumah Tapak
 - c. Diterbitkannya Juknis SE No. 05 Dirjen KP tentang Petunjuk Teknis SIRENG Tahun 2026 (6 Juli 2026)
 - d. Diterbitkannya Juknis Format dan Mekanisme Pemenuhan Kewajiban Pelaku Usaha serta Tata Cara Pengenaan Sanksi No. 06 Dirjen KP (6 Juli 2026)
24. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Antar Instansi/Lembaga Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Perumahan
- a. Koordinasi serta kolaborasi dengan Instansi lain terkait komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui kegiatan Hari Konsumen Nasional dengan Kementerian Perdagangan
25. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Perumahan dan Konsumen serta Pelaporan Kinerja
- a. Penyusunan sistem dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dilaksanakan di akhir tahun anggaran
26. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Perencanaan dan Teknis Pengembangan Teknologi Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Diskusi Potensi Kajian Rumah Terjangkau (Affordable Housing) dan Rapat Pembahasan Lanjutan Kajian Rumah Terjangkau (Affordable Housing).
 - b. Perhitungan Estimasi Biaya BPS.
 - c. Reviu Produk Katalog Elektronik Bidang PKP dari Pemda DIY.
 - d. Pembahasan Dukungan kepada Kementrans untuk Rumah Transmigran.
 - e. Pendampingan Satgas Bencana di Tapanuli Tengah 12-17 April 2026.
 - f. Kajian Teknis Nilai Bantuan Hunian Tetap Pasca Bencana.
 - g. Pendampingan Itjen untuk persiapan pembangunan Huntap Lewotobi Laki-Laki NTT.
 - h. Surat Balasan Pemeriksaan RISHA Kab. Lebak (BP3KP Jawa I).
27. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan NSPK Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Pendalaman Substansi Keputusan Menteri PKP tentang Pedoman Teknis Perencanaan Tapak dan Lantai Perumahan dengan pakar sebanyak 2 kali
 - b. Penyusunan Rancangan AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi, dan Program Kerja untuk Organisasi Profesi JF PKP dan sebagai bahan untuk dibawa ke Kongres Organisasi Profesi JF PKP
28. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Dukungan Teknis Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Pembahasan Lanjutan Rencana Perjanjian Kerja Sama Kliring Teknologi dengan POLAR UI
 - b. Pembahasan Mekanisme Standar Operasional Prosedur (SOP) Kliring Teknologi
 - c. Rapat Koordinasi dan Penyelarasan SOP Kliring Teknologi
 - d. Finalisasi SOP Kliring Teknologi
 - e. Sosialisasi SOP Kliring di Jogja
 - f. Pembuatan SOP Penilaian Cepat Rumah Terdampak Bencana
 - g. Pembuatan Form Penilaian Cepat Rumah Terdampak Bencana
 - h. Pengumpulan usulan DED Rumah Sederhana untuk Prototipe Rumah Layak Huni dari Pengembang, K/L dan Pemda
 - i. Proses permohonan domain klinik.pkp.go.id kepada Pusdatin Kementerian PKP untuk website landing page klinik PKP
 - j. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk integrasi HUB dengan SIMBG untuk modul fasilitasi perizinan
 - k. Revisi indikator pemeriksaan konstruksi rumah satu lantai untuk Sistem Pemantauan Konstruksi dari BTBGPL dan BPB
29. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman
- a. Telah selesai dilakukan verifikasi dokumen Uji Kompetensi JF PKP Gelombang I TA 2026 dan melakukan perhitungan PAK sampai menerbitkan Surat Rekomendasi serta melakukan verifikasi peserta yang direkomendasikan untuk mengikuti Uji Kompetensi JF PKP Gelombang II TA 2026.

- b. Verifikasi dokumen dan perhitungan angka kredit peserta yang lolos Uji Kompetensi JF PKP Gelombang II TA 2026 untuk penerbitan surat rekomendasi.
- c. Menerbitkan Surat Rekomendasi Formasi JF PKP bagi Instansi Daerah (Kab. Karang Anyar, Kab. Tangerang, Kab. Buton Tengah, Kota Madiun, Kab. Kapuas Hulu).
- d. Telah mengirim ABK JF PKP ke Biro SDMO Kementerian PKP.
- e. Melaksanakan uji petik permohonan formasi JF PKP di Kota Pangkal Pinang.
- f. Sistem Informasi masih dalam tahap pengembangan oleh Subdit PJFPPP.
- g. Melaksanakan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan di Depok, Jawa Barat
- h. Telah tercapai output kegiatan Bimbingan teknis sebanyak 50 orang pekerja konstruksi pada tanggal 27-28 Juni 2026 di Semarang, dalam kegiatan:
 - Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Sertifikasi Pekerja Konstruksi (Tukang) dalam mendukung Program BSPS TA 2026 pada tanggal 7-8 April 2026 .
 - Rapat Pembahasan Konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS) Rencana Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Sertifikasi Pekerja Konstruksi (Tukang) pada tanggal 21 April 2026.
 - Rapat Pembahasan Skema Pembiayaan Rencana Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Sertifikasi Pekerja Konstruksi (Tukang) pada tanggal 28 April 2026.
 - Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Sertifikasi Pekerja Konstruksi (Tukang) pada tanggal 13 Mei 2026.
 - Rapat Koordinasi dan Finalisasi Rencana Pembekalan dan Sertifikasi Pekerja Konstruksi dalam Mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 23 Juni 2026.

- Pelaksanaan pilot project pembekalan dan sertifikasi pekerja konstruksi mendukung program BSPS TA 2026 di Kab. Semarang pada tanggal 27-28 Juni 2026 dengan peserta yang dilatih sebanyak 50 orang.

30. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Teknologi dan Akuntabilitas Kinerja

- a. Penyusunan 10 Konsep Laporan Hasil Reviu dalam rangka Pelaksanaan Advis Teknis Dukungan pengembangan teknologi dan pengembangan infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Penyampaian Hasil Reviu terhadap Konsep Petunjuk Teknis Penyediaan, Penatausahaan, dan Pengelolaan Komponen Pra-Cetak untuk mendukung Pembangunan Perumahan Perdesaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
- c. Penyampaian Hasil Reviu terhadap 3 usulan desain Prototype Rumah Sederhana Hijau yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
- d. Koordinasi penerapan dan Penyampaian Komitmen MR TA 2026 UPT T-2 Direktorat Bina Teknik PKP
- e. Pemantauan MR TA 2025 UPT T-1 dan T-2 Direktorat Bina Teknik PKP
- f. Pembahasan Penanganan Bencana Alam Sektor PKP untuk Pulau Sumatera khususnya Provinsi Sumatera Barat
- g. Pembahasan lanjutan Penyiapan Tugas Pembantuan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan

31. Pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

- a. Terlaksananya pengelolaan BMN DJKP melalui proses Penetapan Status Penggunaan, penyusunan laporan BMN Semester I, serta percepatan inventarisasi aset eks Kemenpera.
- b. Sampai dengan TW II telah dilakukan inventarisasi terhadap 346 NUP dari total 2.353 NUP serta pemenuhan kebutuhan sarana kerja pendukung operasional DJKP.
- c. Telah disampaikan 22 surat usulan dalam rangka dukungan pengembangan kompetensi pegawai

- d. Telah disampaikan surat usulan pemetaan kebutuhan pelatihan bagi pejabat di lingkungan DJKP dan Balai.
- e. Dukungan terhadap penataan organisasi Kementerian PKP melalui pelaksanaan penilaian kapabilitas kelembagaan
- f. Telah dilaksanakan pembinaan terhadap pegawai yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaan tugas
- g. Pada TW II TA 2026, dukungan diberikan melalui fasilitasi kegiatan kedinasan pimpinan, koordinasi antar unit kerja, serta pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Direktorat sesuai kebutuhan organisasi.
- h. Progres Penyerapan Anggaran satker DJKP TW 2 45,54%
- i. Nilai IKPA tingkat eselon I DJKP TW 2 62,99 %
- j. Tidak ada pagu minus dalam penyerapan anggaran.
- k. Telah terbit SE Dirjen tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Satker DJKP 2026
- l. Terbit juknis pembayaran uang lembur di lingkungan DJKP dan Balai
- m. Terlaksananya konsolidasi LHP atas pelaksanaan Program BSPS Tahun 2025 terkait kesesuaian penetapan penerima bantuan, pengelolaan dana, serta pembayaran Tim Fasilitator Lapangan sebagai dasar penyusunan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- n. Terlaksananya layanan komunikasi publik DJKP melalui pengelolaan informasi, publikasi kegiatan, dokumentasi, serta peningkatan kualitas layanan informasi publik.
- o. Pada TW II telah dilaksanakan SKM, pengelolaan media sosial Instagram dan TikTok, pembinaan kontributor komunikasi publik, penyusunan laporan monev media sosial, serta penyusunan draf SK Tim Pelayanan Informasi Publik dan PPID DJKP.
- p. Telah dilaksanakan pengelolaan arsip baik secara digital (online) maupun fisik (offline)
- q. Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum dan instrumen hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pembinaan regulasi kepada internal dan stakeholder terkait.

- r. Output TW II meliputi penyusunan 1 Peraturan Menteri, 2 Surat Edaran Dirjen, 1 Instruksi Dirjen, 28 Surat Keputusan, serta fasilitasi 1 PKS yang telah ditandatangani dan 2 PKS dalam proses finalisasi.
- s. Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Strategi Pengelolaan Media Sosial serta Penulisan Rilis di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Balai P3KP tanggal 24 April 2026
- t. Telah dilakukan Evaluasi Penerapan MR Tahun Anggaran 2025 untuk unit kerja dan unit organisasi
- u. Telah dilakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2026 untuk unit kerja (Setditjen KP) dan Unit Organisasi (DJKP) dengan nilai 4,266

Sedangkan pada beberapa indikator kegiatan, capaian dihitung pada Laporan Kinerja Tahunan yang bersumber dari intervensi tidak langsung dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Kawasan Permukiman sepanjang tahun 2026, beberapa indikator tersebut antara lain:

- IKK. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah pesisir;
- IKK. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir;
- IKK. Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Selain itu terdapat indikator yang tercantum di Renstra, namun tidak dialokasikan pada DIPA TA 2026. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Ditjen Kawasan Permukiman pada triwulan ke II (Bulan Maret sampai Juni) 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel II. 4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Ditjen Kawasan Permukiman Triwulan II

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
						Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
								Rp	%
	Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	SP-1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman							
	IKSP-1	Persentase ketersediaan rumah layak huni	%	100		29,72	20,06		
	IKSP-2	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100		34,49	43,49		
	K-1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Kawasan Permukiman							
	SK-1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni							
		IKK.1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	%	100		1,75	1,25		
			7659.ABF.001 Kebijakan dan Strategi Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1.631.996.000	0	0	379.298.000 23.24

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			dan Kawasan Permukiman (RO 2025)							
			7659.PBF.001 Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	20	2.440.576.000	1	1	636.476.750	26.08
			7659.BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	20	1.189.734.000	1	1	317.038.144	26.65
			7659.FAE.001 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	2	643.095.000	0	0	61.130.634	9.51
		IKK.2 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah pesisir		%	100		4.50	5.00		
			7659.BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	20	1.189.734.000	1	1	317.038.144	26.65
		IKK.3 Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir		%	100		34,49	43,49		

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7659.ABF.001 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman							
			realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman (Unit BSPS)	Desa	54		21	10		
				Unit	120.000		45.987	31.030		
			7659.ABF.001 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman							
			Capaian Renstra Ditjen Kawasan Permukiman 2025-2029 dan Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman hingga memenuhi desa 100% RLH	Desa	54		0	0		
	K-2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman								

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
	SK-2	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman								
		IKK.1 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU		%	100		0.00	0.00		
			7659.ABF.003 Kebijakan Fasilitasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1.123.066.000	0	0	86.820.047	7.73
			7659.CBR.001 Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	Dokumen	2	2.470.553.000	0	0	361.537.694	14.63
			7659.FAE.002 Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	2	1.422.777.000	0	0	115.136.306	8,09
			7659.AFA.002 Penyusunan NSPK Bidang Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	NSPK	0		0	0		
			7659.PEA.001 Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman	Kegiatan	1	299.203.000	0	0	26.375.736	8,82
		IKK.2 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum*		%	100		0.00	0.00		
			7659.RBB.001 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan	Unit	807	10.524.600.000	0	0	126.366.280	1,20

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			prasarana, sarana, dan utilitas umum							
		IKK.3 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal		%	-		-			
			7659.RBB.004 PSU Hunian Vertikal di Kawasan Permukiman	Unit	-		-			
		IKK.4 Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau		%	100		21,69	13,08		
			7659.PEA.001 Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman	Kegiatan	1	299.203.000	0	0	26.375.736	8,82
			(BA BUN) Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan 457.025 Unit selama 5 tahun	Unit	95.800		41.559	25.052		
	K-3	Penyediaan Rumah Layak Huni								
	SK-3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
		IKK.1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas		%	100		26,66	0.13		
			7659.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	120.000	2.670.000.000.000	45.987	31.030	683.428.657.472	25.60
			7659.RBB.007 Rumah Bersanitasi Layak di Kawasan Permukiman	Unit	1.000	10.800.000.000	150	0	32.574.000	0.30
		IKK.2 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru		%	100		0.00			
			7659.RBB.005 Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	0		0	0		
		IKK.3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman		%	100		16,67	76,67		
			7659.ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rekomendasi kebijakan	1	765.411.000	0	0	222.228.599	29.03
			7659.AFA.003 Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	NSPK	1	265.251.000	0	3	58.394.378	22.01
			7659.BMA.003 Data dan Informasi Kawasan Permukiman	Dokumen	1	161.064.000	0	0	93.272.260	57.91

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman							
			7659.CBR.002 Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	3	2.280.553.000	1	1	1.222.175.087	53.59
			7659.FAE.003 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan	4	2.616.142.000	2	2	876.570.901	33.51
	K-4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
	SK-4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
		IKK.1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru (Rumah Khusus)*		%	100		0.00	0.00		
			7659.RBB.003 Rumah Khusus Kawasan Pesisir	Unit	244	80.625.340.000	0	0	200.211.150	0.25
		IKK.2 Persentase Peningkatan penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (Rumah Susun)*		%	100		0.00	0.00		
			7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun*	Unit	85	36.000.000.000	0	0	362.088.750	1.01
	SP-2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh								
	IKSP	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh		%	100		60.00	0		

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
	K-1	Penanganan Permukiman Kumuh								
	SK-1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu								
		IKK.1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		%	100		60.00	0.00		
			7659.RBB.006 Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	75,00	46.755.740.000	0	0	659.948.389	1.41
	SP-3	Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak								
	IKSP	Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak		%	100		36.67	66.33		
	IKSP-1	Persentase pelaku usaha perumahan anggota asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina		%	80		50	78.99		
	IKSP-2	Persentase Layanan Fasilitas Pengaduan Konsumen Perumahan		%	100		50	100		
	IKSP-3	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		%	100		10.00	20.00		

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
	K-1	Dukungan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
	SK-1	Meningkatnya pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan								
		IKK.1 Persentase asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina		%	100		50.00	39.50		
			7659.BDB.001 Pembinaan Lembaga Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Fasilitasi Bimbingan Teknis Konsumen Perumahan	Lembaga	4	1.082.593.000	4	4	295.507.931	27.30
			7659.ABF.006 Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	431.963.000	0	0	152.495.140	35.30
		IKK.2 Tingkat pencapaian pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan layanan bantuan teknis dalam rangka perlindungan konsumen perumahan		%	100		85	85		
			Persentase pengaduan masyarakat yang dilayani	%	100		100	100		

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
						Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
								Rp	%
		7659.AEA.001 Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Konsumen Perumahan	Kegiatan	1	744.211.000	1	1	201.422.913	27.07
		7659.ABF.005 Kebijakan, Strategi dan Program Bidang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	Rekomendasi Kebijakan	1	134.407.000	0	0	13.255.530	9.86
		7659.ABF.006 Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	431.963.000	0	0	152.495.140	35.30
		7659.AEA.002 Koordinasi Antar Instansi/Lembaga Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Perumahan	Kegiatan	1	236.670.000	1	1	104.982.452	49.88
		7659.FAE.004 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Perumahan dan Konsumen serta Pelaporan Kinerja	Laporan	2	235.746.000	0	0	50.681.196	21.50
	SK-2	Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman							
		IKK.1 Persentase rekomendasi kebijakan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman	%	100		0.00			

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7659.ABF.007 Kebijakan Teknis Pengembangan Teknologi Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RO 2025)	Rekomendasi Kebijakan	1	248.317.000	0	0	18.094.211	7.29
		IKK.2 Persentase regulasi (NSPK) bidang perumahan dan kawasan permukiman		%	100		0.00			
			7659.AFA.002 Penyusunan NSPK Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman	NSPK	1	356.512.000	0	0	74.038.735	20.77
		IKK.3 Persentase dukungan pengembangan teknologi dan pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman		%	100		25.00	25.00		
			7659.CBR.003 Dokumen Dukungan Teknis Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	4	1.098.704.000	1	1	134.584.651	12.25
			jumlah dokumen dukungan teknis pengembangan teknologi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	1		1	1		
			jumlah dokumen dukungan teknis pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	3		0	0		

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
		IKK.4 Persentase peningkatan kapasitas ASN pejabat fungsional bidang perumahan dan kawasan permukiman		%	100		25.00	75.00		
			7659.DCB.001 Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman	Orang	200	484.616.000	50	150	95.118.155	19.63
			Jumlah ASN (JF PKP dan non JF PKP) yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman	Orang	150	319.159.000	0	100	39.766.931	12.46
			Jumlah Penyelenggara Konstruksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman	Orang	50	165.457.000	0	50	55.351.224	33.45
		IKK.5 Persentase hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja		%	100		0.00			
			7659.FAE.005 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Teknologi dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	201.337.000	0		50.139.782	24.90
	Program	Dukungan Manajemen								
	SP-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
	IKSP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		%	86.26		43.13	44.03		
	IKSP-1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	74.1	117.320.000	37.05	37.05	325.000	0.28
			7674.EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1					
	IKSP-2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		%	72.38	8.738.822.000	36.19	24,07	4.337.699.761	49.64
			7674.EBA.Z06 Layanan BMN	Layanan	20					
			7674.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1					
			7674.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	106					
	IKSP-3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		%	82.1	630.560.000	41.05	41.05	248.051.652	39.34
			7674.EBA.Z01 Layanan Hukum	Layanan	1					
	IKSP-4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana		%	75	932.415.000	37.5	37.5	97.395.063	10.45
			7674.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1					
			7674.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1					
			7674.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	Layanan	37					

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
	IKSP-5	Nilai Kinerja Anggaran		%	88.5	4.495.647.000	44.25	56.46	1.555.198.111	34.59
			7674.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	61					
			7674.EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1					
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1					
	IKSP-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100	424.283.000	50.00	50.00	6.024.500	1.42
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1					
	IKSP-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		%	92.3	100.000.000	46.15	23.08	43.897.708	43.81
			7674.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1					
	IKSP-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	86.25	444.320.000	43.13	43.13	57.474.999	12.94
			7674.EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1					
	IKSP-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		%	100	180.091.000	50.00	50.00	30.937.500	17.18
			7674.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	19					
	IKSP-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP		%	92	197.400.000	46.00	78	68.906.875	34.91

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7674.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1					
	K-1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
	SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		%	87.8					
		IKK.1 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	72.38	8.738.822.000	36.19	24.07	4.337.699.761	49.64
			7674.EBA.Z06 Layanan BMN	Layanan	20					
			7674.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1					
			7674.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	106					
		IKK.2 Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100.00	932.415.000	50.00	25.00	97.395.063	10.45
			7674.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1		1	1		
			7674.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1		1	1		
			7674.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	Layanan	37					
		IKK.3 Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	88.50	4.495.647.000	44.25	72.87	524.382.531	11.66

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7674.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	61					
			7674.EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1					
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1					
		IKK.4 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100.00	424.283.000	50.00	50.00	6.024.500	1.42
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1					
		IKK.5 Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.30	100.000.000	46.15	46.15	43.807.708	43.81
			7674.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1					
		IKK.6 Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	86.25	444.320.000	43.13	43.13	57.474.999	12.94
			7674.EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1					
		IKK.7 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	74.10	117.320.000	37.05	37.06	325.000	0.28
			7674.EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1		1	1		
		IKK.8 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		%	82.10	630.560.000	41.05	41.05	248.051.652	39.34
			7674.EBA.Z01 Layanan Hukum	Layanan	1					

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW II			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
		IKK.9 Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		%	92.00	197.400.000	46.00	78.00	68.906.875	34.91
			7674.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1					

II.3 Permasalahan

Evaluasi kinerja merupakan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu program dan kegiatan. Dalam pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Begitu pula dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang tidak semuanya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target program dan kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya maka dilakukan identifikasi terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh masing – masing unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Selanjutnya perlu dilakukan identifikasi terhadap tindak lanjut sebagai langkah antisipasi agar kendala dan permasalahan tersebut tidak terjadi lagi dan perbaikan untuk pelaksanaan kerja pada periode selanjutnya.

Pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat revisi anggaran sebanyak 4 (empat) kali yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. 24 April 2026 (DIPA Revisi Ke – 3)
 - a. Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 Tanggal 1 April 2026 Hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026 dan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 076/ND/Sj/2026 Tanggal 9 April 2026 Hal Rencana Revisi Penajaman Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2026, terdapat arahan penajaman anggaran pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebesar Rp81.088.544.000,00 yang terdiri dari pemotongan RO Khusus sebesar Rp45.216.130.000,00 dan RO Reguler sebesar Rp35.872.414.000,00.
 - b. SPRA No. S-263/AG/AG.3/2026 Tanggal 24 April 2026 Hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-3 pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2026."
2. 5 Mei 2026 (DIPA Revisi Ke – 4)
 - a. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Nomor RU0802/Dk/129/T/2026 Hal Revisi Rencana Sebaran Lokasi Pembangunan

Rumah Susun Baru TA 2026 pada Setiap Unit Organisasi Teknis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanggal 15 April 2026 dan dalam rangka percepatan pelaksanaan fisik, terdapat penyesuaian target output dan pergeseran anggaran kegiatan Pembangunan PSU, Pembangunan Rumah Susun, Penanganan Kawasan Kumuh, Bantuan Sanitasi dan BSPS.

- b. SPRA No. S-291/AG/AG.3/2026 Tanggal 5 Mei 2026 Hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-4 pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2026. Selanjutnya, Dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan atau hambatan yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang ditemukan pada masing – masing unit kerja tersebut dapat dilihat dibawah ini.
3. 26 Mei 2026 (DIPA Revisi Ke – 5)
 - a. Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor 280/ND/Dp.04/2026 Tanggal 15 Mei 2026 Hal Ralat Kedua Permohonan Revisi DIPA Buka Blokir 02 Kegiatan BSPS Wilayah Kerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahap II, terdapat usulan pembukaan blokir anggaran kegiatan BSPS tahap II sebesar Rp424.726.361.000,00 dilakukan dengan mekanisme pembukaan blokir dalam halaman IV DIPA TA 2026.
 - b. Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Hal Usulan Penyesuaian Rincian Output (RO) Nomor 088/ND/Dp.05/2026 tanggal 17 April 2026, terdapat usulan penurunan target output dalam RO-Non PN 7659.BDB.001 Pembinaan Lembaga Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Fasilitas Bimbingan Teknis Konsumen Perumahan dari semula 5 lembaga menjadi 4 lembaga.
 - c. SPRA No. S-334/AG/AG.3/2026 Tanggal 26 Mei 2026 Hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-5 pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2026.
 4. 26 Juni 2026 (DIPA Revisi Ke – 6)
 - a. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor PR.01.2/Sj/304/B/2026 Tanggal 13 Maret 2026 Hal Pemutakhiran Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Bidang Permukiman Tahun 2026-2028 dan Surat Pernyataan Hasil Optimalisasi Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 70/PY/Dp/2026 Tanggal 22 Mei 2026, terdapat usulan tambahan anggaran pada RO RBB.001 dan RBB.003 sebesar Rp2.338.947.462.000,00.

- b. SPRA No. S-404/AG/AG.3/2026 Tanggal 26 Juni 2026 Hal Pengesahan Revisi Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2026.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- Proses Penetapan Status Pengguna dan inventarisasi BMN masih berjalan secara bertahap dengan mempertimbangkan sebaran lokasi aset, keterbatasan SDM, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran.
- Beberapa mekanisme pertanggungjawaban belanja layanan perkantoran masih dalam proses pembahasan bersama Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.
- Distribusi BMN kepada unit kerja dilakukan secara bertahap setelah proses pendataan dan inventarisasi selesai.
- Keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dinas luar negeri apabila beberapa akomodasi tidak ditanggung sepenuhnya oleh instansi pengutus
- Hingga saat ini, masih diperlukan proses penataan guna mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien.
- Kekurangan pegawai dengan kompetensi Analis SDM.
- Kurangnya pemahaman pegawai mengenai disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan
- Kebutuhan layanan umum bersifat dinamis mengikuti prioritas penugasan pimpinan dan unit kerja, sementara alokasi perjalanan dinas terbatas
- Anggaran SPIP dan MR belum didistribusi ke unit kerja
- Kurangnya pegawai di DJKP yang telah bersertifikat atau telah mengikuti pelatihan MR
- Penyesuaian perencanaan kegiatan TA 2027 Dukman untuk Balai dan Satker belum dibagi berdasarkan proporsi

- Sumber daya pada TW II difokuskan pada penyelesaian target kegiatan BMN yang harus selesai pada bulan Oktober sehingga acara pembinaan balai belum dilaksanakan
- LHP belum diterbitkan oleh itjen, karena untuk saat ini yang telah diterbitkan oleh itjen adalah mengenai konsep temuan pemeriksaan
- Waktu Pengumpulan bukti dukung terutama untuk RO yang terdapat anggaran Balai didalamnya dilaksanakan dalam waktu bersamaan
- Dukungan SDM komunikasi publik masih perlu diperkuat, khususnya kebutuhan SDM dengan kompetensi/Jabatan Fungsional Pranata Humas
- Kompetensi sumber daya manusia di bidang kearsipan masih terbatas
- Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai, khususnya terkait ketersediaan box file terlebih dikarenakan adanya perpindahan kantor
- Tahapan pembahasan dan koordinasi antar pihak masih memerlukan tambahan waktu, sehingga berdampak pada penyelesaian produk hukum secara keseluruhan.
- Masih butuh koordinasi dengan unit kerja di dalam atau di luar DJKP dan Kementerian/Lembaga baik menyusun/membahas MoU/PKS dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Masih terdapat variasi kualitas pengelolaan media sosial dan website antar Balai, sehingga penyajian data dan informasi publik belum optimal

2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

- Capaian layanan Klinik PKP di BP3KP Sumatera II tahun 2026 masih rendah, dari target 2.340 layanan baru tercapai 346 layanan per 1 Juni 2026.
- Balai P3KP Sumatera II masih menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
- Sebagian pemerintah daerah belum memahami Program 3 Juta Rumah secara utuh, sehingga dukungan daerah terhadap layanan Klinik PKP belum optimal.
- Pengembangan website Klinik PKP Balai masih terkendala penyediaan server.

- Pengelolaan Rusun Seruwai masih membutuhkan perbaikan layanan, terutama air bersih, pemeliharaan rutin, keamanan, fasilitas umum, dan kanal pengaduan penghuni.
- Belum ditetapkannya standar yang seragam mengenai alur pelaksanaan, pembagian tugas, dan penyampaian data antarunit kerja pada pelaksanaan input capaian RO pada aplikasi e-Monev Bappenas. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan ketidakkonsistenan data, keterlambatan pelaporan, serta kurang optimalnya akuntabilitas data kinerja.
- Adanya target Program 3 Juta Rumah memerlukan upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang berkontribusi dalam penyelenggaraan program penyediaan perumahan guna mendukung pencapaian target tersebut
- Kegiatan persiapan pelaksanaan SAKIP terkait Evaluasi maupun Konsinyasi pengumpulan dokumen SAKIP terkendala dengan belum adanya petunjuk teknis resmi Evaluasi SAKIP dan pelaksanaan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal, sehingga pelaksanaan kegiatan terkait Evaluasi SAKIP belum dapat dilaksanakan pada Triwulan II.
- Dalam pelaksanaan pemantauan, kegiatan dilaksanakan sesuai KAK

3. Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

- Belum terbangun sistem pengumpulan data pelaporan progres dan output secara rutin
- Keterbatasan ketersediaan lahan yang clear and clean, baik dari aspek legalitas, status kepemilikan, kesesuaian tata ruang, maupun kesiapan teknis
- Belum optimalnya integrasi data dan informasi terkait kesiapan lahan dan kebutuhan PSU kawasan permukiman sebagai basis perencanaan, penetapan prioritas, dan pengambilan kebijakan yang efektif serta berbasis kebutuhan
- Keterbatasan regulasi, pedoman, dan NSPK yang operasional sebagai acuan pelaksanaan fasilitasi penyiapan lahan dan PSU kawasan permukiman

- Keterbatasan ketersediaan dan kapasitas penggunaan software dan peralatan survei lapangan
- Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi teknis lahan untuk pembangunan kota satelit kurang optimal karena kurangnya waktu dan persiapan koordinasi awal
- Pemahaman antar PPK terhadap penyusunan dokumen perencanaan teknis Bantuan PSU TA 2026 masih beragam
- Rusun TNI AL masih terdapat isu kesiapan lahan siap bangun dan kelengkapan dokumen teknis
- Rusun MBR Depok menggunakan lahan Komdigi yang terokupansi
- Rusus Huntap Lewotobi masih terdapat isu legalitas lahan
- Huntap Relokasi Terpusat untuk Masyarakat Korban Bencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar masih terdapat isu legalitas lahan dan pemenuhan RC lainnya serta masih terdapat Pemda yang belum mengajukan usulan melalui SIBARU
- Kegiatan pembangunan Rumah Susun harus terkontrak bulan Mei 2026
- Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus tidak dapat diselesaikan di tahun 2026 dengan 244 unit
- Terdapat sisa anggaran dari alokasi 807 unit PSU
- Rumah Susun MBR Depok dan Huntap Lewotobi belum dapat diajukan MYC sehingga dapat menunda proses kontrak fisik dan MK
- Masih adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan bantuan pembangunan Rumah Susun dan penyediaan Rumah Khusus yang memerlukan penyempurnaan
- Belum terdapat SDM dengan jabatan fungsional pembiayaan
- Belum tercapai kesepakatan mengenai mekanisme pelaksanaan monitoring penyaluran FLPP Tahun 2026 serta monitoring pascapenyaluran berdasarkan data FLPP Tahun 2021–2025 antara Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan PKP selaku penanggung jawab (PIC) kegiatan.
- Direktorat teknis belum memiliki akses terhadap data FLPP, khususnya data By Name By Address (BNBA), yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran FLPP.

- Belum dilaksanakannya analisis kebutuhan anggaran sampling monitoring penyaluran FLPP karena belum ada kesepakatan pembagian wilayah dan jadwal monitoring.
- Belum ada tools digital yang digunakan sebagai skema pelaksanaan monitoring penyaluran FLPP.
- Saat ini Pengadaan Barang/Jasa belum berproses dikarenakan masih dalam tahap penyusunan DED oleh Satker/PPK.
- Kesiapan pengembang masih belum optimal dalam memenuhi kriteria pembangunan yang dipersyaratkan, sehingga sebagian unit rumah belum siap huni pada saat pelaksanaan akad kredit maupun ketersediaan unit rumah ready stock di lapangan.
- Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi kelayakan kredit masih terbatas, terutama dipengaruhi oleh hasil BI Checking serta kemampuan pembayaran angsuran yang belum memenuhi standar analisis perbankan.
- Ketersediaan rumah ready stock yang tersedia sebagian besar telah terserap untuk penyerapan Target Kuota tambahan FLPP di akhir tahun 2025 sehingga untuk Ketersediaan Unit Rumah Ready Stock di Awal Tahun 2026 sangat terbatas yang mempengaruhi ketidakcapaian realisasi TW II sesuai target yang direncanakan.
- Lahan untuk lokasi pembangunan huntap Lewotobi belum clean and clear serta masih terdapat dokumen RC yang belum lengkap dipenuhi oleh Pemda.
- Terdapat beberapa dokumen Readiness Criteria (RC) Huntap Relokasi Terpusat yang memerlukan perbaikan
- Usulan Rusun TNI AL Kabupaten Pasuruan tidak ada anggaran untuk melaksanakan pengurugan lahan
- Kondisi lahan pada lokasi usulan Rusun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan saat ini masih terdapat bangunan eksisting berupa rumah dinas yang merupakan aset Kejaksaan Tinggi.

4. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

- Terdapat data CPB yang tidak memenuhi syarat sehingga data tersebut dikembalikan ke pengusul untuk diberikan data pengganti

- Terdapat desa/kelurahan dengan alokasi BSPS yang kurang dari 10 unit;
- Jarak antar lokasi CPB cukup jauh sehingga menghambat proses verifikasi;
- Jumlah tenaga fasilitator yang terbatas sehingga menghambat proses verifikasi lapangan;
- Kepemilikan tanah CPB tidak jelas sehingga tidak dapat dilanjutkan.
- Terdapat usulan yang tidak memenuhi syarat
- Terdapat lokasi yang tidak memiliki sumber air bersih
- Keterbatasan pagu untuk pelaksanaan seluruh program sehingga diperlukan identifikasi mendalam untuk distribusi dan pemanfaatan anggaran
- Rincian target output program fisik (RBB) yang belum terdefinisi sejak awal dan masih memerlukan penyesuaian sepanjang triwulan 1-2
- Waktu penyiapan revisi anggaran yang sangat minim
- Keterbatasan SDM pada Tim Penyiapan Program dan Anggaran Dit. Bangkim
- Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Sanitasi Permasalahan:
 - i. Perlunya revisi perubahan terhadap pedoman teknis penanganan kumuh dan sanitasi.
 - ii. Perbedaan pemahaman pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
 - iii. Perlu penyesuaian dengan regulasi dan kelembagaan Kementerian PKP.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh (Rapermen) Permasalahan:
 - i. Belum tersedia regulasi khusus mengenai pencegahan kawasan permukiman kumuh di Kementerian PKP.
 - ii. Perlu penguatan aspek pencegahan selain peningkatan kualitas.
 - iii. Memerlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Penyusunan SOP di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Permasalahan:
 - i. Belum adanya seluruh proses bisnis memiliki SOP yang terdokumentasi.

- ii. Adanya perubahan struktur organisasi dan proses bisnis.
- iii. Belum seragamnya pelaksanaan layanan internal.
- Penyusunan PKS dengan Mitra CSR terkait Dukungan Penanganan Kawasan Kumuh/BSPS Permasalahan:
 - i. Belum optimalnya kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR dalam mendukung target 3 juta rumah.
 - ii. Belum adanya kesepakatan kerja sama yang baku.
 - iii. Perlu kejelasan ruang lingkup, peran, dan mekanisme pelaksanaan kerja sama.
- Data dan informasi kegiatan masih tersebar dan terfragmentasi di berbagai tautan Google Drive maupun OneDrive milik perseorangan
- Direktorat seringkali tidak dapat memenuhi permintaan data secara cepat dari Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun kementerian/lembaga lainnya
- Data-data SK Kumuh Kabupaten/Kota yang dikirimkan oleh pemda memiliki format yang berbeda-beda dan sulit dibaca, sehingga cukup sulit untuk diolah kembali
- Keterbatasan SDM pada Tim Jakstra dan Pelaporan
- Terdapat kendala dalam pemenuhan dokumen sehingga menghambat proses lelang
- Terdapat pergantian lokasi kawasan kumuh karena adanya masalah lahan, sehingga membutuhkan waktu tambahan bagi pemda untuk memenuhi dokumen persyaratan pada lokasi yang baru (Provinsi NTT)
- Proses pemantauan progres belum dapat 100% dilakukan melalui aplikasi MyPKP dan GoPKP, sehingga masih perlu media lain seperti excel online yang harus diisi oleh masing-masing balai/satker. Akibatnya, data yang disampaikan pada GoPKP dan excel online menunjukkan hasil yang berbeda
- Adanya efisiensi anggaran sehingga membatasi kegiatan monev di lapangan
- Keterbatasan SDM pada Tim Jakstra dan Pelaporan
- Terdapat paket kumuh yang belum tayang disebabkan oleh SK Pokja yang belum terbit: dan

- Keterlambatan pemenuhan dokumen RC oleh pemerintah daerah.

5. Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen

- Banyak pengaduan teknis SIRENG yaitu pengembang tidak bisa log in ke SIKUMBANG dengan NPWP 15 digit karena implementasi sistem administrasi perpajakan terbaru melalui Coretax Administration System oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sehingga perlu penyesuaian NPWP dari 15 digit ke 16 digit
- Keterbatasan anggaran berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan, dalam rencana TA 2026, terdapat rencana kegiatan pembinaan kepada 4 lembaga terkait untuk pengaturan : Permen PKP 04/2025, Permen PKP 18/2025, SE DJKP tentang PPBR sebagai turunan Permen PKP 18/2025, dan Permen Pembinaan dan perlindungan konsumen
- Anggaran Direktorat Pada tahun 2027 semakin berkurang apabila dibandingkan dengan TA 2026, sehingga mengakibatkan sebagian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Renstra tidak dapat dijalankan
- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kajian dan koordinasi antar instansi lembaga dalam rangka penyusunan Peraturan Menteri dan turunannya
- Menunggu fasilitasi nota kesepahaman Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta Badan Standarisasi Nasional (BSN) atau Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- Terdapat penyesuaian anggaran sehingga perlu optimalisasi pelaksanaan kegiatan kembali
- Belum ada penyelesaian terkait permasalahan kekurangan SDM, dikarenakan unit kerja lain juga mengalami kekurangan, dan belum dapat menambah SDM baru
- Keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang terlaksana secara optimal
- Pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan pelaku usaha perumahan belum berjalan secara optimal

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi di lapangan menyebabkan cakupan pengawasan belum dapat menjangkau seluruh lokasi secara optimal.
- Keterbatasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan

6. Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Belum terlaksananya koordinasi lebih lanjut untuk pembahasan Kajian Rumah Terjangkau (Affordable Housing).
- SOP Pelaksanaan Inspeksi dan advis teknis sudah tersusun namun belum ada kesepakatan.
- Perlu ada peralatan uji lapangan yang memadai dalam pelaksanaan advis teknis (Hammer test, rebar scanner, dll).
- Komplikasi substansi yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk pendalaman pemahaman
- Diperlukan sinkronisasi dengan peraturan baru yang sudah terbit maupun yang sedang disusun
- Pembentukan Organisasi Profesi JF PKP harus melibatkan perwakilan JF PKP dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sehingga butuh rapat pembahasan secara berulang untuk menyepakati Rancangan AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi, dan Program Kerja
- Belum dilakukan pembahasan terkait form penilaian produk audiensi dan rencananya akan ditindaklanjuti pada TW III.
- Pengembangan Sistem Informasi Penghubung Pembangunan Rumah Swadaya oleh Masyarakat
 - i. Masih terkendala perihal kode akun belanja untuk pengadaan penyedia pengembangan aplikasi.
 - ii. Integrasi aplikasi HUB dengan SIMBG masih belum jelas sehingga perlu adanya kesepakatan pimpinan.
 - iii. Pembahasan indikator Sistem Pemantauan Konstruksi yang masih perlu dilakukan.
- Rekomendasi Teknis Penanganan Bencana:
 - i. Kegiatan koordinasi tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya pengurangan anggaran.

- Dukungan Teknis Penyelenggaraan Rumah Layak Huni:
 - i. Pelaksanaan pengembangan DED Rumah Layak Huni TA.2025 tidak berjalan sesuai rencana karena terkendala dalam menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024.
- Kesulitan dalam memverifikasi dokumen yang tidak lengkap atau kurang jelas
- Butuh waktu cukup panjang dalam pelaksanaan penghitungan angka kredit karena dilakukan pemeriksaan berlapis oleh tim verifikatur, ketua tim, dan kasubdit
- Terdapat beberapa dinas di daerah yang belum siap ketika diadakan rapat koordinasi untuk verifikasi lanjutan sehingga rapat harus ditunda sampai dinas siap.
- Masih terdapat peserta bimbingan teknis yang bukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan
- Pemberkasan administrasi pertanggungjawaban kegiatan masih dalam proses dikarenakan dokumen kerjasama yang belum final.
- Waktu koordinasi yang terbatas antar pihak dalam menentukan lokasi, peserta, dan penyusunan dokumen kerja sama (PKS) dalam melaksanakan kegiatan pembekalan/bimbingan teknis pekerja konstruksi kedepannya.
- Sulitnya pengumpulan bukti dukung dan pengisian laporan pemantauan penerapan RTP MR.
- Belum tuntasnya status kepemilikan dan administrasi terkait pertanahan untuk pembangunan Huntap Pascabencana Hidrometeorologi di Pulau Sumatera.
- Belum terbitnya Instruksi Presiden terkait Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan.

Dengan diidentifikasinya beberapa permasalahan yang ditemukan pada masing – masing unit kerja diatas, maka dilakukan perumusan rencana mekanisme tindak lanjut yang juga dilakukan oleh masing – masing unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman seperti yang telah dilampirkan pada bagian berikutnya.

BAB III PENUTUP

III.1. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari hasil capaian target kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Triwulan II dapat dilihat sebagai berikut.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
 - a. Bersurat kepada Biro BMN/Sekretariat Jenderal terkait kejelasan PSP BMN serta menginstruksikan seluruh Balai untuk mempercepat inventarisasi dan distribusi BMN dengan target penyelesaian inventarisasi pada bulan September
 - b. Melakukan koordinasi dan tindak lanjut atas hasil pembahasan dengan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal terkait mekanisme pertanggungjawaban belanja, sehingga proses pembayaran dan realisasi anggaran dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan.
 - c. Mempercepat proses inventarisasi dan distribusi BMN
 - d. Mengoptimalkan keikutsertaan pada diklat dalam negeri ataupun luar negeri yang apabila akomodasi ditanggung seluruhnya
 - e. Menyusun rekomendasi-rekomendasi berupa telaah terhadap kondisi organisasi dan pegawai khususnya di DJKP dan Balai
 - f. Mengirimkan surat permohonan penambahan pegawai khususnya dengan Jafung Analis SDM
 - g. Mengeluarkan Memorandum Dirjen Kawasan Permukiman perihal penegakan disiplin pegawai
 - h. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran sesuai prioritas serta mengusulkan penyesuaian alokasi anggaran melalui mekanisme yang berlaku
 - i. Akan dilakukan pembahasan terkait perencanaan anggaran SPIP dan MR dengan dit SS
 - j. Pembagian proporsi balai mengikuti kegiatan fisik
 - k. Pelaksanaan pembinaan Balai dijadwalkan pada minggu kedua bulan Juli (TW III) terkait pengelolaan keuangan dan sosialisasi juknis-juknis
 - l. Menunggu terbitnya LHP untuk proses tindak lanjut
 - m. Pelaksanaan pembinaan Balai dijadwalkan pada minggu kedua bulan Juli (TW III) terkait pengelolaan keuangan dan sosialisasi juknis-juknis
 - n. Menunggu terbitnya LHP untuk proses tindak lanjut
 - o. Menerima kesempatan terbuka untuk pemegang dengan jurusan/kompetensi yang sesuai
 - p. Mengikutsertakan pegawai untuk ikut pelatihan Jafung Arsiparis
 - q. Menginventarisir kebutuhan media pengarsipan
 - r. Telah dilaksanakan beberapa kali pembahasan dan koordinasi antar pihak dan juga target pelaksanaan di triwulan

- s. Dilakukan koordinasi terkait penyusunan dan pembahasan MoU/PKS dan penanganan pengaduan masyarakat.
- t. Melakukan pembinaan dan monitoring secara berkala terhadap pengelolaan media sosial dan website Balai, termasuk penyusunan standar pengelolaan konten, peningkatan kapasitas admin, serta optimalisasi penyediaan bank konten sebagai bahan publikasi
- u. Anggaran MR direncanakan dianggarkan pada tahun 2027 pada masing-masing unit kerja
- v. Akan diadakan pelatihan MR pada Triwulan III TA 2026
2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
 - a. Memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi melalui pelibatan dosen dan mahasiswa dalam edukasi, pendataan, pendampingan, riset, desain rumah, dan layanan digital.
 - b. Menyusun TOR kerja sama Klinik PKP dengan perguruan tinggi agar peran, mekanisme, keluaran, dan kebutuhan dukungan lebih jelas.
 - c. Mendorong pemerintah daerah membentuk atau mengembangkan layanan Klinik PKP di dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota.
 - d. Mengoptimalkan media sosial, Posyandu, dan sarana berkumpul warga sebagai kanal edukasi dan sosialisasi layanan Klinik PKP.
 - e. Perlu dilakukan pembahasan SOP Pengumpulan Data Kinerja serta SOP Pengumpulan Data Fisik dan Anggaran guna memperjelas mekanisme pelaporan kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, meningkatkan akuntabilitas pelaporan, serta memastikan dokumen pendukung Evaluasi SAKIP terdokumentasi dan tersip dengan baik
3. Direktorat Penyiapan Lahan dan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
 - a. Melaksanakan FGD Integrasi Penanganan PSU serta Tata Kelola Penyelenggaraan PSU dalam rangka menjaring informasi dan masukan bidang Penyiapan Lahan dan PSU
 - b. Menyusun, menyempurnakan, dan mengimplementasikan instrumen kebijakan serta NSPK yang operasional, disertai penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala dan terintegrasi untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan fasilitasi penyiapan lahan dan PSU kawasan permukiman
 - c. Menyusun draft SOP Proses Bisnis Bantuan PSU serta SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fisik Pembangunan PSU sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bantuan PSU yang akan diterapkan pada Tahun 2027

- d. Melaksanakan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, Kantor Pertanahan (ATR/BPN), dan instansi terkait guna percepatan penyelesaian legalitas lahan, penetapan status kepemilikan, kesesuaian tata ruang, serta pemenuhan persyaratan teknis lokasi.
- e. Pelaksanaan workshop penggunaan software dan peralatan survei lapangan serta pengadaan peralatan survei lapangan
- f. Penyepakatan timeline serta produk kegiatan antar unit kerja pengampu lahan
- g. Perlu dilakukan koordinasi seluruh PPK bersama tiga Direktorat Jenderal teknis untuk menyamakan pemahaman terhadap penyusunan dokumen perencanaan teknis Bantuan PSU TA 2026
- h. Perlu dilakukan koordinasi seluruh stakeholder yang terlibat
- i. Perlu dicari alternatif lokasi lahan lain untuk pengganti
- j. Perlu dilakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat
- k. Perlu dilakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota terdampak untuk mempercepat proses pemenuhan RC dan penyelesaian legalitas kepemilikan lahan serta peningkatan pemahaman terkait pengajuan usulan melalui SIBARU
- l. Pelaksanaan Verifikasi usulan Rumah Susun TNI AL Pasuruan dan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta pengajuan permohonan dispensasi pelaksanaan kontrak
- m. Telah diajukan usulan perubahan output Rumah Khusus dan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (MYC) kepada DJA Kemenkeu
- n. Menambah jumlah output di Satker yang sama untuk memaksimalkan anggaran yang ada
- o. Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Rumah Susun MBR Depok TA 2026-2027 dan Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Rumah Khusus Kawasan Pesisir TA 2026-2027
- p. Mengajukan usulan perubahan dan penyempurnaan petunjuk teknis dan menghadiri rapat penyempurnaan petunjuk teknis
- q. Penambahan jabatan fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan kegiatan pembiayaan

- r. Melaksanakan rapat tindak lanjut dengan Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan untuk menyepakati mekanisme pelaksanaan monitoring penyaluran FLPP
 - s. Mengajukan akses data BNBA FLPP dari TKPR kepada Kepala Pusdatin
 - t. Menyusun usulan alokasi anggaran sampling monitoring FLPP berdasarkan metode sampling, jumlah lokasi, kebutuhan sumber daya, serta estimasi biaya
 - u. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan PKP dalam penyiapan tools digital untuk mendukung pelaksanaan monitoring penyaluran FLPP.
 - v. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Satker/PPK untuk mempercepat penyusunan dan penyelesaian Detailed Engineering Design (DED), sehingga dokumen perencanaan dapat segera digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses pengadaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - w. Koordinasi dan Pemantauan berkala dengan BP Tapera dan melalui Dashboard Ekosistem Pembiayaan Perumahan BP Tapera
 - x. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk mempercepat penyelesaian status lahan menjadi clear and clean serta melengkapi dokumen Readiness Criteria (RC) sebagai persyaratan pembangunan hunian tetap.
 - y. Berkoordinasi bersama BP3KP dan Pemda setempat dalam memenuhi kelengkapan Readiness Criteria (RC) untuk Huntap Sumatera
 - z. Pembahasan dengan Ditjen TKPR, Itjen dan Ditjen Perumahan Perkotaan terkait pembebanan anggaran Rusun TNI AL
 - aa. Balai Sulawesi III akan kembali berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk pelaksanaan pembongkaran yang ditargetkan akan dilaksanakan pada bulan Juli
4. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
- a. Melakukan koordinasi dengan pengusul untuk mencari pengganti CPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengusul diarahkan agar dapat memberikan data CPB yang memang membutuhkan BSPS dan memiliki dokumen yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil screening awal yang sudah dilakukan oleh masing-masing pengusul;
 - b. Memaksimalkan alokasi minimal 10 unit per desa dengan mengurangi kuota desa yang alokasinya lebih dari 10 unit. Walaupun demikian, terdapat desa dengan alokasi 8 hingga 9 unit karena merupakan desa/kelurahan

prioritas, sehingga Balai P3KP melengkapi justifikasi teknis untuk keadaan tersebut;

- c. Balai/Satker terus melakukan rekrutmen TFL hingga memenuhi kebutuhan untuk verifikasi lapangan, memperpanjang kontrak TFL untuk ditugaskan pada unit bsps yang berbeda;
- d. Memaksimalkan tenaga ASN/CPNS untuk melaksanakan fungsi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) berdasarkan surat tugas; dan
- e. Memberikan waktu kepada CPB untuk mengurus Surat Bukti Kepemilikan Tanah agar memiliki alas hak yang jelas atas tanah tersebut.
- f. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengusulkan BNBA pengganti dan mencari titik lokasi lain di kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam kawasan kumuh
- g. Melakukan kolaborasi bersama pemda dan K/L dalam penyediaan sumber air bersih
- h. Distribusi anggaran berdasarkan tingkat prioritas
- i. Menyelesaikan revisi anggaran sesuai timeline
- j. Mengajukan penambahan personil
- k. Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Sanitasi
- l. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh (Rapermen)
- m. Penyusunan SOP di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
- n. Penyusunan PKS dengan Mitra CSR terkait Dukungan Penanganan Kawasan Kumuh/BSPS
- o. Melakukan pengembangan aplikasi SIBANGKIM sebagai database informasi kawasan permukiman
- p. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mengolah data SK Kumuh
- q. Penambahan 1 peserta magang
- r. Pemda dan subdirektorat wilayah secara intens melakukan koordinasi bersama Balai P3KP melalui zoom untuk memantau progres pemenuhan dokumen RC
- s. Balai P3KP, Subdirektorat Wilayah, dan Pemda melakukan koordinasi secara intens dalam menentukan lokasi baru yang memenuhi syarat

- t. Direktorat Teknis bersama PUSDATIN secara berkala melaksanakan koordinasi dalam pemutakhiran aplikasi GoPKP agar pemantauan progres BSPS dapat dilakukan secara penuh di aplikasi tersebut
 - u. Balai/Satker dan direktorat teknis melakukan follow up terkait SK Pokja ke Biro PBJ
 - v. Balai/Satker melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah sehingga dokumen RC dapat dipenuhi.
5. Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Melakukan pembahasan lanjutan Kajian Rumah Terjangkau (Affordable Housing) bersama Kementerian ESDM, GIZ, dan Pemprov DKI Jakarta.
 - b. Merencanakan dan/atau melaksanakan survei lokasi hunian vertikal mendukung substansi kajian rumah terjangkau bersama Tim GIZ dan Pemprov DKI Jakarta.
 - c. Akan dilaksanakan pembahasan SOP Advis Teknis dengan Direktorat BTBGPL Kementerian PU.
 - d. Melaksanakan advis teknis dengan alat yang ada dan terus melakukan pemenuhan peralatan uji lapangan dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.
 - e. Melakukan diskusi dengan pakar/praktisi ahli perumahan
 - f. Mempelajari peraturan terkait baik yang sudah terbit maupun yang sedang disusun agar tidak menimbulkan resistensi pengaturan
 - g. Meningkatkan intensitas koordinasi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam penyusunan Rancangan AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi
 - h. Melaksanakan Kongres Organisasi Profesi JF PKP pada TW III dengan mengundang perwakilan Instansi Pusat dan Instansi Daerah
 - i. Akan dilakukan pendistribusian Buku Panduan Pelaksanaan Kliring Teknologi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Balai P3KP dan Pemda di Wilayah Jabodetabek dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.
 - j. Rencana pembahasan form penilaian produk audiensi pada TW III.
 - k. Pengembangan Sistem Informasi Penghubung Pembangunan Rumah Swadaya oleh Masyarakat

- l. Melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait terkait arahan kode akun belanja pengadaan Sistem Informasi.
- m. Pembahasan lanjutan pembahasan PKS SIMBG dengan Direktorat BPB, Pusdatin PKP, Pusdatin PU, Bag. Hukum, dan Biro Hukum guna melanjutkan integrasi aplikasi HUB dan SIMBG.
- n. Mengutamakan penyusunan SOP dan Form penilaian cepat yang tidak memerlukan anggaran signifikan
- o. Akan dilakukan penjangkaran masukan terhadap DED Rumah Layak Huni untuk usulan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana
- p. Koordinasi dengan peserta yang mengajukan pendaftaran Uji Kompetensi JF PKP Gelombang II TA 2026 untuk dokumen yang kurang atau sulit untuk diverifikasi
- q. Menambah SDM dari tim lain untuk mempercepat perhitungan angka kredit sehingga bisa segera dilakukan pemeriksaan oleh ketua tim dan kasubdit
- r. Membuat jadwal ulang rapat koordinasi dengan memberikan syarat pengajuan ulang surat usulan dari Sekda ke Direktorat Bina Teknik
- s. Memverifikasi peserta bimbingan teknis sehingga peserta yang berpartisipasi diutamakan pejabat fungsional penata kelola perumahan
- t. Melakukan percepatan finalisasi dan pengesahan dokumen kerjasama (PKS) pembekalan dan sertifikasi pekerja konstruksi mendukung program BSPS TA 2026 antara Direktorat Bina Teknik PKP (Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP) dan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi (Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PU).
- u. Membuat rencana kegiatan Pembekalan/Bimbingan Teknis Pekerja Konstruksi kedepannya lebih efektif dan efisien terutama dalam menentukan lokasi, peserta, jenis sertifikasi, dan penyusunan dokumen kerja sama (PKS).
- v. Melakukan koordinasi dan pengumpulan Bukti Dukung Evaluasi SAKIP dan Manajemen Risiko Direktorat Bina Teknik PKP yang terpusat melalui sistem satu basis data (one gate system).

- w. Koordinasi bersama masing-masing Satker Balai Sumatera I, II, dan III terkait percepatan penyelesaian status kepemilikan dan administrasi terkait pertanahan untuk pembangunan Huntap Pascabencana Hidrometeorologi di Pulau Sumatera.
- x. Koordinasi pembahasan tindak lanjut Rancangan Instruksi Presiden untuk Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan.
- 6. Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen
 - a. Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen mengirimkan surat Himbauan Penyesuaian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Menjadi 16 Digit Pada Aplikasi SIRENG
 - b. Penyesuaian prioritas serta peninjauan kembali rencana kegiatan agar selaras dengan alokasi anggaran yang tersedia terutama terkait sosialisasi permen pkp dan SE DJKP yang telah terbit
 - c. Diusulkan tambahan anggaran pada TA 2027 yang dilakukan berjenjang, dari unit kerja sampai tingkat kementerian
 - d. Diusulkan penyesuaian anggaran Direktorat untuk memenuhi tugas dan fungsi
 - e. Melakukan koordinasi untuk fasilitasi nota kesepahaman Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta Badan Standarisasi Nasional (BSN) atau Komite Akreditasi Nasional (KAN)
 - f. Penyusunan draft Peraturan Menteri PKP tentang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen
 - g. Penyusunan draft Peraturan Menteri PKP tentang Pengelolaan Rumah Tapak.
 - h. Diusulkan penyesuaian anggaran Direktorat untuk memenuhi tugas dan fungsi
 - i. Pelaksanaan penguatan SDM melalui bimtek mediator
 - j. Pelaksanaan sharing knowledge dengan kementerian/lembaga dalam rangka penguatan layanan pengaduan konsumen
 - k. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko
 - l. Optimalisasi SDM dan anggaran.
 - m. Optimalisasi SDM dan anggaran.
 - n. Penguatan koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder

LAMPIRAN

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Layanan Klinik PKP (04 – 05 Juni 2026)



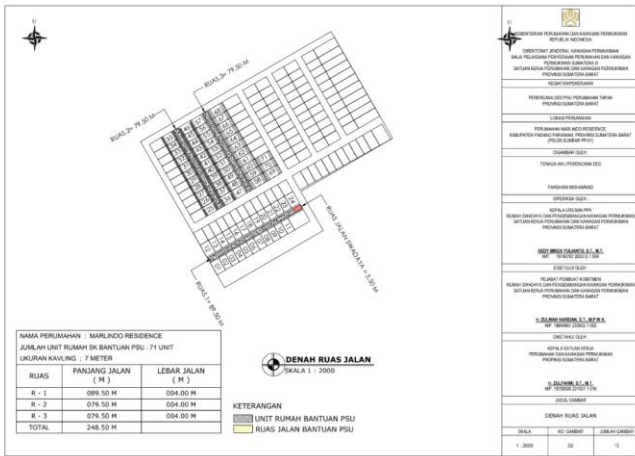
Pelaksanaan Rapat Pemenuhan *Readiness Criteria* Pembangunan Hunian Tetap (Huntap)



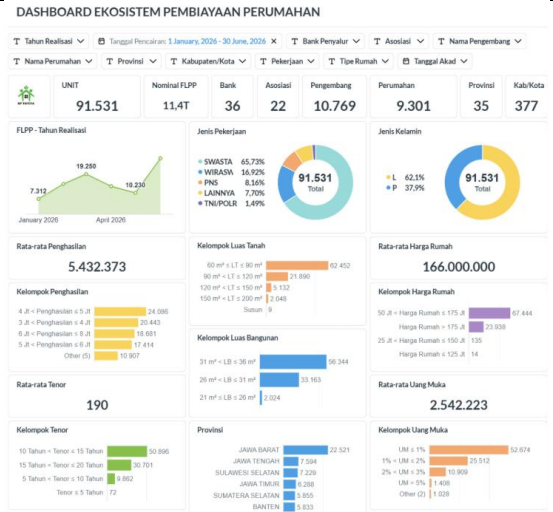
Pelaksanaan Sosialisasi Pelaku Usaha Bidang Perumahan



Pembuatan DED progran bantuan pembangunan PSU



Pembuatan Dashboard Ekosistem Pembiayaan Perumahan



Instruksi Verifikasi CPB Tahap X Kegiatan BSPS TA. 2026 untuk Wilayah Kerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (19 Juni 2026)



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Gedung BP BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 13, Gambir, Jakarta Pusat 10110

Nomor : RU.10.03/Dp.04/330/B/2026
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga
Hal : Instruksi Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) Tahap X Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA. 2026 Wilayah Kerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Yth. (Daftar Penerima Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan penanganan rumah tidak layak huni melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 Wilayah Kerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan verifikasi lapangan terhadap daftar nama usulan calon penerima BSPS By Name By Address (BNBA) dalam tautan dan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam laman <https://go/pkp.go.id> atau Lampiran II.
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi lapangan mengacu pada ketentuan kriteria dan persyaratan penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus serta Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/DJ/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya beserta perubahannya.
- Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara dilengkapi dengan penjelasan tentang proses verifikasi lapangan, rekapitulasi hasil verifikasi, rincian data yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan yang dilengkapi penjelasan serta daftar nama calon penerima bantuan dengan jumlah tidak melebihi alokasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- Hasil verifikasi calon penerima bantuan agar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada lampiran II, paling lambat tanggal 20 Juli 2026.
- Seluruh Kepala Balai P3KP agar melaksanakan instruksi ini secara cermat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman



Dr. Anggoro Putro, S.T., M.Sc.
NIP 198309052008121001

Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Usulan calon peserta pelatihan AITC 2026)



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raden Patah 1 Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

Nomor : KP 0902/Dp.01/558/B/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Usulan Calon Peserta Pelatihan AITC 2026:
*Community-Led Housing Development and
Collective Housing in Thailand*

Jakarta, 27 April 2026

Yth. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor KP0902-Sj.09/497 Tanggal 22 April 2026 Hal Penawaran Pelatihan AITC 2026: *Community-Led Housing Development and Collective Housing in Thailand*, bersama ini kami sampaikan Usulan Calon Peserta Pelatihan AITC 2026: *Community-Led Housing Development and Collective Housing in Thailand* dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman atas nama:

Nama Lengkap, NIP, Jabatan	Unit Kerja	Nomor Telepon
Audrey Therrisia, S.Ars. NIP 199806192022032012 Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	0813-4170-0542

Untuk kelengkapan dokumen persyaratan kami sampaikan melalui tautan [Usulan Pelatihan AITC 2026: CLHDCHT](#).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal



Musrifah, S.T., M.T.
NIP 197602162002122001

LAPORAN TRIWULAN II

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

2026